

SISTEM POLITIK DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

(REALITAS, TANTANGAN DAN PANDANGAN DALAM PEMBENTUKAN BANGSA)

Oleh :

Catharina Dewi Wulansari

PENDAHULUAN

Gagasan sistem politik dan demokrasi di Indonesia pada hakekatnya tercantum dengan jelas di dalam Pembukaan UUD 1945 dan pada pasal-pasal dalam batang tubuhnya. Sila keempat Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 dan pasal 1 ayat (2) dalam batang tubuhnya telah menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut asas kedaulatan rakyat. Dalam asas ini terkandung unsur pokok bahwa setiap rakyat memiliki hak untuk ikut aktif dalam kegiatan yang bersifat politik. Dengan demikian, negara Indonesia adalah negara demokratis.

Dalam melaksanakan sistem politik dan demikian, negara Indonesia adalah negara demokratis ini menurut pasal 1 ayat 2 UUD 1945 disebutkan bahwa, sistem yang dianut adalah sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Ini dibuktikan oleh adanya lembaga-lembaga negara yaitu MPR, DPR dan adanya partai-partai politik.

Mengenai demokrasi di Indonesia telah disepakati bahwa, demokrasi yang dipakai adalah sistem Demokrasi Pancasila yang secara umum dan formal telah diatur di dalam UUD 1945 yang termaktub di atas.

Jika kita membicarakan tentang sistem Demokrasi Pancasila, maka yang menjadi masalah adalah tentang perkembangan demokrasi ini dan bagaimana mengisi, mempraktekkan apa yang terkandung di dalamnya ke dalam bentuk amal perbuatan dan tingkah laku politiknya. Pada kesem-

patan ini dicoba menggambarkan hakekatnya sistem politik dan demokrasi di Indonesia ditinjau dari realitas, sistem politik dan demokrasi di Indonesia ditinjau dari realitas, tantangan dan pandangan dalam pembentukan bangsa.

SISTEM POLITIK DAN DEMOKRASI INDONESIA

Sistem politik pada hakekatnya dapat didefinisikan sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial, melalui mana nilai-nilai disebarkan untuk suatu masyarakat. (David Easton, 1965). Dalam kata lain sistem politik tak lain ialah, mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng. Proses diartikan mengandung dimensi waktu. Struktur diartikan semua aktifitas yang dapat diobservasikan atau diidentifikasi guna menentukan sistem politik itu sendiri. (Rusadi Kantaprawira, 1981).

Struktur politik dalam sistem politik dibedakan atas infra struktur politik dalam sistem politik. Infra struktur politik adalah struktur politik masyarakat/rakyat, suasana dalam kehidupan politik masyarakat/rakyat, sektor politik masyarakat; sedangkan supra struktur politik adalah struktur politik pemerintahan, sektor pemerintahan, suasana pemerintahan (Gabriel A. Almond & James S. Coleman, 1960).

Dengan demikian berbicara tentang suatu sistem politik berarti kita telah berbicara tentang kehidupan politik masya-

rakat dan kehidupan politik pemerintah. Sedangkan kehidupan politik masyarakat itu pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari pertautan hubungan yang erat dengan masyarakat itu sendiri, mengingat kehidupan politik masyarakat tidak ada jika masyarakat sendiripun tidak ada. Dan dengan sendirinya kehidupan politik masyarakat mempunyai pertautan hubungan dengan kehidupan politik pemerintah atau demikian sebaliknya.

Dalam pertautan hubungan itu tadi, mana yang lebih kuat pengaruhnya tergantung kepada beberapa faktor yaitu (a) kondisi sosial-budaya masyarakat; (b) ajaran yang dianut masyarakat dan negara; (c) karakteristik pemerintah sebagai pemegang dan pelaksana kedaulatan.

Dari sejarah sistem politik dan demokrasi di Indonesia dilema yang dihadapi selalu berkisar masalah pluralisme kondisi sosial-budaya masyarakat yang diwarnai oleh adanya perbedaan dalam kebudayaan, politik, ideologi, kedaerahan, "primordial attachments" dan agama daripada adanya perbedaan kepentingan atau kehendak sosial-ekonomi. Sebagaimana dapat dilihat dari pengalaman politik Indonesia selama ini, pluralisme demikian lebih banyak mendatangkan ketegangan politik, pertentangan ideologi, rasa sentimen kedaerahan, atau perselisihan agama daripada merangsang berkembangnya suatu sistem politik yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat secara demokratis, sehat dan wajar. Periode yang demikian dalam sejarah sistem politik di Indonesia dikenal dengan sistem politik demokrasi-liberal dan sistem politik demokrasi terpimpin.

Dilihat dari hal di atas, maka masalah perkembangan sistem politik dan demokrasi di Indonesia sebagian tergantung dari kemampuan untuk merubah atau menghilangkan sifat-sifat atau ciri pluralisme yang kurang menguntungkan dalam sistem politik dan demokrasi di Indonesia.

Di samping itu faktor lain yang di-

ketengahkan turut mempengaruhi proses perkembangan sistem politik dan demokrasi di Indonesia adalah perbedaan sikap yang menyolok antara harapan yang tinggi dengan kenyataan yang ada dan dapat dicapai. Menurut seorang ahli politik Indonesia Herbert Feith, dipermulaan tahun 1955 banyak orang yang mempunyai harapan terlalu tinggi akan hasil pemilihan umum yang diselenggarakan untuk pertama kalinya itu, yang seolah-olah dapat menyelesaikan kemelut pelik dalam politik yang dihadapi pada masa itu. Akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian sehingga hal ini menimbulkan rasa kecewa dari beberapa kalangan yang kemudian mengalir kesangsian terhadap sistem politik dan demokrasi yang dijalankan. Kondisi yang demikian menimbulkan krisis politik yang tajam bahkan menimbulkan rasa kelesuan yang dalam terhadap sistem politik dan demokrasi.

Lahirnya order baru setelah gagalnya Coup D'etat G30S/PKI pada tanggal 30 September 1965, penataan sistem politik dan demokrasi di Indonesia arahnya semakin jelas. Supra struktur politik atau sistem organisasi pemerintahan dapat menjalankan mekanisme yang benar seperti yang ditetapkan di dalam UUD 1945, dan masing-masingnya telah berfungsi pada proporsinya yaitu MPR, Presiden, DPA, DPR, BPK dan Mahkamah Agung. Sedangkan kedudukan dan hubungan kerja telah diatur dengan tegas dan jelas di dalam ketetapan MPR No. III/MPR/1978. Tentang Pemilihan Umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan /Perwakilan Rakyat diatur dalam UU No. 1 tahun 1985 (sebagai pengganti diubahnya UU No. 15 tahun 1969, UU No. 4 tahun 1975 dan UU No. 2 tahun 1980). Mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD diatur di dalam UU No. 2 tahun 1985 (sebagai pengganti diubahnya UU No. 16 tahun 1969 dan UU No. 5 tahun 1975). Sedangkan mengenai Parnpol dan Golkar diatur dalam UU No. 3 tahun 1985 (sebagai pengganti diubahnya UU No. 3 tahun 1975). Referendum di atur dalam UU

No. 5 tahun 1985, dan mengenai organisasi Kemasyarakatan diatur dalam UU No. 6 tahun 1985.

Dengan demikian pada masa pemerintahan orde baru ini penataan sistem politik dan demokrasi di Indonesia semakin mendapatkan arah yang jelas dalam rangka usaha pencapaian tujuan dan kepentingan nasional yang didambakan dan sekaligus dalam usaha pembentukan bangsa yang kokoh, kuat terhindar dari perpecahan.

MASALAH SISTEM POLITIK DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Usaha dalam melaksanakan pembangunan nasional, masalah yang mungkin timbul dalam sistem politik dan demokrasi di Indonesia adalah kesenjangan antara pembangunan di bidang ekonomi dan politik. Di satu pihak mementingkan pemecahan masalah yang dihadapi secara rasional dan obyektif di lain pihak dihadapkan dengan kenyataan untuk membangkitkan solidaritas dan partisipasi masyarakat secara sungguh-sungguh, emotif dan menyeluruh.

Untuk yang pertama, dikehendaki hasrat untuk melancarkan pembangunan ekonomi yang memerlukan pemikiran dan penilaian yang obyektif dan rasional, adanya birokrasi yang efisien, penempatan para ahli yang sesuai dengan bidang kecajakapannya, serta kemampuan menggunakan pengetahuan-pengetahuan teknis. Hal seperti ini sering disebut sebagai "The problem solving task" dari suatu proses pembangunan. Kedua, dikehendaki keperluan untuk meningkatkan rasa kesatuikatan antara seorang anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya sebagai satu bangsa. Rasa sama-sama terikat ke dalam suatu unit politik yang sama disertai dengan pemberian loyalitas politik tertinggi terhadap unit tersebut. Untuk merangsang partisipasi masyarakat, inilah kiranya yang disebut aspek politik dari proses pembangunan yang sering disebut sebagai "the solidarity building task of development". (Alfian, 1981).

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa antara aspek ekonomi dan politik memiliki pautan-hubungan yang erat. Pengalaman Presiden Sukarno memberi bukti bahwa pemusatan perhatian yang berlebihan di bidang politik tanpa memikirkan kesenjangan ekonomi yang membiarkan keadaan ekonomi semakin memburuk, berakibat buruk ke dalam sistem politik dan demokrasi pada saat itu. Oleh karena itu daya tahan suatu sistem politik dan demokrasi sangat sensitif terhadap tingkat keserasian antara kedua aspek itu.

Semakin senjang atau kurang serasinya hubungan antara kedua aspek itu semakin besar pula kemungkinan sistem politik dan demokrasi itu mendapat gangguan dan kesukaran. Bilamana gangguan itu demikian besar ancamannya, bukan tidak mungkin mengakibatkan berakhirnya kehadiran sistem politik dan demokrasi itu. Dan hal inilah yang kiranya dapat menjadi masalah dalam sistem politik dan mekanisme demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu sistem politik yang ideal untuk Indonesia adalah sebuah sistem yang mempunyai mekanisme yang dapat menyerasikan aspek ekonomi dan politik di atas sesempurna mungkin. Secara ideal pula mekanisme tersebut kita bayangkan sebagai mekanisme demokrasi Pancasila.

PENDIDIKAN POLITIK DALAM PEMBENTUKAN BANGSA

Untuk mengisi dan mempraktekkan apa yang terkandung di dalam demokrasi pancasila ke dalam bentuk amal perbuatan dan tingkah laku politik itu tidaklah mudah karena antara lain ia memerlukan suatu penghayatan. Penghayatan itu sendiri memerlukan suatu proses sosialisasi atau proses pendidikan politik yang tentunya memerlukan waktu. Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia ditinjau dari segi ini rupanya banyak tergantung pada lancarnya atau tidaknya proses pendidikan politik. Sejalan dengan itu salah satu hal yang mungkin banyak mempengaruhi ialah perbuatan dan tingkah laku orang-orang atau

lembaga-lembaga yang mempunyai pengaruh besar terhadap sistem politik yang ada dan berlaku.

Inti pendidikan politik itu tiada lain adalah pemahaman politik atau pemahaman aspek-aspek politis dari setiap permasalahan. Dan pemahaman politik berarti pemahaman konflik. Banyaknya konflik dalam masyarakat itu disebabkan adanya kontroversi, perbedaan pikiran dan tindakan manusia dalam bermasyarakat. Di samping itu juga disebabkan oleh adanya persamaan keinginan dan tingkah laku sehingga memunculkan banyak persaingan, kompetisi dan konflik. Maka hidup bermasyarakat itu adalah hidup di tengah banyak dimensi konflik dan ketegangan. Sedangkan berbuat politik berarti mempengaruhi dan ikut mengambil keputusan di tengah medan politik dan pertarungan konflik-konflik tersebut. Pendidikan politik diadakan untuk mempersiapkan: (a) kader-kader politik yang mampu berfungsi dalam pertanggung jawaban politik; (b) untuk mendapatkan penyelesaian politik; (c) sesuai dengan konsep politik yang telah ditetapkan. Selanjutnya pendidikan politik itu merupakan proses mempengaruhi individu agar ia mendapatkan informasi, wawasan, dan ketrampilan politik; sehingga sanggup bersikap kritis, dan lebih intensional agar arah hidupnya, juga bisa menjadi warga negara yang lebih mantap, tidak terapung tanpa bobot dan tanpa pengarahan di tengah kancah politik. Selanjutnya ia sanggup mendapatkan reorientasi terhadap keadaan sendiri dan kondisi lingkungannya. Dengan demikian pendidikan politik mendorong orang untuk melihat diri sendiri dan lingkungannya dengan cara lain, lalu berbuat lain, menuju pada eskalasi diri dan peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Maka dapat dipahami bahwa pendidikan politik menentukan dalam pembentukan bangsa, oleh karena itu pendidikan politik sifatnya tidak boleh indoktrinatif. Sebab pendidikan yang indoktrinatif menyebabkan orang menjadi kaku, fanatik sempit pandangan; mentalnya menjadi dungu dan kacau, sebab perilakunya sering menentang hati nurani sendiri dan realitas

yang dihadapi; juga menentang kehendak dan aspirasi umum. Jika pendidikan politik dilakukan dengan baik dan sistematis, maka bisa ditumbuhkan kekuatan-kekuatan kontra yang demokrasi dan positif; yaitu merupakan kekuatan yang krisis melawan situasi kondisi yang tidak sehat, tidak mantap, dan tidak wajar, kemudian orang berusaha menciptakan iklim yang lebih demokratis, dan membuat kondisi sosial menjadi lebih baik lagi. (Kartini Kartono, 1989).

Oleh karena itu dalam konteks tersebut di atas, maka pendidikan politik di Indonesia dapat dinyatakan sebagai: rangkaian upaya edukatif yang sistematis dan intensional untuk memantapkan kesadaran politik dan kesadaran bernegara, dalam menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah hidup serta landasan konstitusional; juga merupakan upaya pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia dalam rangka tegaknya satu sistem politik yang demokratis, sehat dan dinamis. Pendidikan politik dalam bahasa edukatif dapat dinyatakan; (a) pendidikan politik merupakan upaya belajar dan latihan untuk mensistematisasikan aktifitas sosial, dan pembangunan kebijakan terhadap sesama di suatu wilayah negara; (b) pendidikan politik itu identik dengan pembentukan hati nurani politik yang di dalamnya secara implisit mencakup pertanggung jawaban etis terhadap sesama warga negara; (c) pendidikan politik menumbuhkan skeptisisme politik dan kearifan wawasan politik mengenai semua jaringan politik; (d) pendidikan politik mendorong orang untuk melakukan perbaikan terhadap jaringan-jaringan kemasyarakatan; (e) pendidikan politik membahas konflik-konflik politik yang aktual. (Kartini Kartono; 1989).

Landasan pokok yang dipakai dalam melaksanakan pendidikan politik ialah Pancasila, UUD 1945, GBHN dan Sumpah Pemuda 1929. Khusus bagi generasi mudanya, tujuan pendidikan politik di Indonesia ialah : (a) membangun generasi muda Indonesia yang sadar politik dan sadar

akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; (b) sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang perwujudannya tersermin dalam sejumlah sifat wadah kepribadian Indonesia.

PENUTUP

Tetapi dalam setiap membahas tentang sistem politik dan demokrasi di Indonesia, maka kita tidak dapat memisahkan bangsa itu dari perjalanan sejarah politik yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu sistem politik di Indonesia ini dapat dikenal dari periode sejarahnya yaitu, periode sistem politik demokrasi liberal, sistem politik demokrasi terpimpin dan sistem politik demokrasi Pancasila. Sistem politik di Indonesia mengandung makna sebagai sistem politik yang berlaku atau sebagai mana adanya di Indonesia, baik dari keseluruhan proses yang utuh maupun sebagian saja. Ia juga merupakan sistem politik yang dikategorikan serta berfungsi sebagai mekanisme politik dan demokrasi di Indonesia. Untuk mengisi demokrasi dan mempraktekkan ke dalam amal perbuatan dan tingkah laku politik tidaklah sesederhana penyampaiannya, karena itu membutuhkan antara lain suatu penghayatan, suatu proses

sosialisasi atau suatu proses pendidikan politik. Penganutan paham demokrasi, khususnya di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 membawa pengaruh penerapan secara konsekuensi asas-asas demokrasi di segala bidang kehidupan. Sedangkan iklim demokrasi memberikan kemajuan, kemudahan dan pembangunan. Namun ia juga memberi dampak perubahan, guncangan, ketidakpuasan serta kemungkinan-kemungkinan baru yang dapat dilakukan atau diharapkan terjadinya. Demokrasi itu juga membawa konsekuensi lebih jauh yaitu demokratisasi pribadi, dan demokratisasi struktur kemasyarakatan. Sehubungan dengan itu pendidikan politik bukan hanya diarahkan kepada upaya dapat ikut merubah sikap-sikap politik individual saja akan tetapi juga memberikan sumbangan kepada pembaharuan sistem politik, serta lembaga politik dan perubahan struktur masyarakatnya.

Penulis adalah dosen Hukum Adat I dan II, Sosiologi, Hukum Waris, Hukum Sosial, Dasar ketrampilan Hukum, Perancangan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

